



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166

Fax. 0511-6701255 Marabahan - Kabupaten Barito Kuala

Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id

e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini. Akhirnya, semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dan dasar untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas.

Marabahan, 18 September 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ARIS SAPUTERA, S.STP., M.Si

NIP. 19860405 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
 BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinaskominfo Kabupaten Barito Kuala	11
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	11
2.1.2 Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	24
2.1.5 Mitra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemberian Layanan	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	31
2.2.2 Isu Strategis	40
 BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029	43
3.2 Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029	48
3.3 Strategi Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	51
3.4 Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	52
 BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	53
4.1 Uraian Program	53
4.2 Uraian Kegiatan	58
4.3 Uraian sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	58
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo	95
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
 BAB V	
PENUTUP	99
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Penempatan Aparatur Per Bidang Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	17
Tabel	2.2	Capaian Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	18
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026	19
Tabel	2.4	Daftar Kerja Sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	26
Tabel	2.5	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	40
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	50
Tabel	3.4	Penahapan Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	51
Tabel	3.5	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	52
Tabel	4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	60
Tabel	4.3	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	71
Tabel	4.4	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	96
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Awal Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	98

GAMBAR 2.1	Bagan SOTK Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Perbup Nomor 8 Tahun 2025	14
2.2	Grafik Proporsi ASN di Lingkup Diskominfo berdasarkan Pendidikan	15
3.1	Konsep Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	36
3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	37
4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan visi pembangunan yang terangkum dalam Asta Cita. Salah satu wujud implementasi Asta Cita adalah pelaksanaan 17 Program Prioritas, di mana pada Program Prioritas ke-8 menekankan Penguatan Pendidikan Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi.

Selaras dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kepemimpinan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnur, dengan visi Kalsel Bekerja, menetapkan Misi ke-5 yaitu Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat. Arah kebijakan ini mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pada tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di bawah kepemimpinan Bupati Bahrul Ilmi dan Wakil Bupati Herman Susilo, melalui visi BATOLA SATU, juga menegaskan komitmen pada Misi ke-4 RPJMD 2025–2029 yakni Membangun Kualitas Pelayanan Publik melalui Pendidikan Unggul, Kesehatan Komprehensif, dan Tata Kelola Pemerintahan Digital.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah awal untuk

melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
 13. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 14. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
 16. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 17. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang “Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang “Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala “ serta penyesuaian Struktur Organisasi sesuai Perbub Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025.
 22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas masing masing bagian yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan selama lima tahun (masa transisi) dan rencana kerja tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan;
5. Memudahkan/meningkatkan komunikasi para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan berkualitas;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029

3.2. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029

3.3. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang “Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang “ Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala “ serta penyesuaian Struktur Organisasi sesuai Perbup Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Barito Kuala mengacu pada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatik, statistik dan persandian.

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

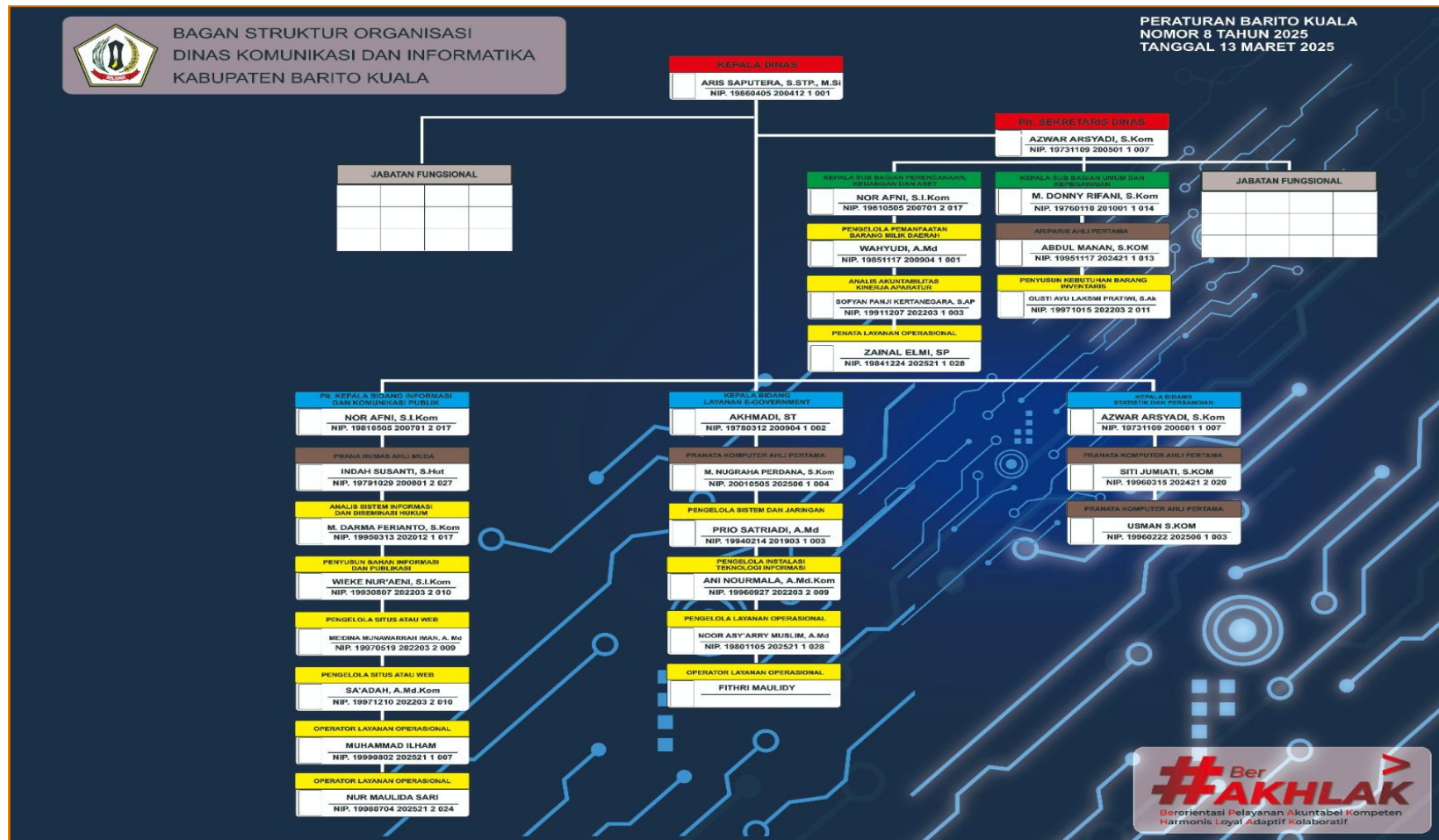
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung-jawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Layanan E-Government, terdiri atas Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Bagan SOTK Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Perbup Nomor 8 Tahun 2025



Suber data : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

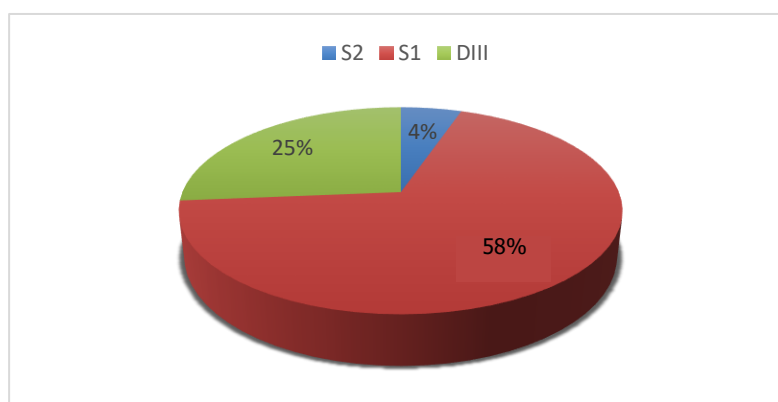
a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip *“The Right Man On The Right Place”*, namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

Seiring dengan lamanya rentang waktu antara pendidikan dengan kondisi pegawai saat ini, dikaitkan pula dengan dinamika perubahan kebijakan ketata pemerintahan yang terjadi menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan terhadap pemahaman atas segala kebijakan yang ada, baik secara administrasi maupun teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kondisi seperti ini tentu saja akan berimbas pada turunya kemampuan kerja aparatur.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan telah diakui dengan diterbitkannya surat keputusan pencantuman gelar, dari 15 PNS dan 7 PPPK yang ada, terdapat sebanyak 1 orang (4%) dengan pendidikan S2, 14 orang (58%) dengan pendidikan S1, 6 orang (25%) dengan pendidikan Diploma, 3 orang SLTA.

Grafik 2.2



Proporsi PNS di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan

b) Penempatan Aparatur

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan PNS di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari berbagai sisi ;

- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 24 orang, dengan 15 laki-laki dan 9 wanita.
- 2) Jumlah outsourcing sebanyak 10 orang
- 3) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a) Dari Jabatan struktural untuk eselon IIB yang berjumlah 1 jabatan, terisi sebanyak 1 jabatan, 1 jabatan terisi oleh laki-laki
 - b) Untuk jabatan eselon IIIA yang berjumlah 4 jabatan, terisi 2 orang seluruhnya oleh laki-laki.
 - c) Untuk jabatan eselon IVA yang berjumlah 2 jabatan, terisi sebanyak 2 jabatan. Terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
 - d) Untuk Jabatan Fungsional yang berjumlah 5 jabatan terisi sebanyak 5 jabatan, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
- 4) Penempatan PNS per Bidang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bidang - Bidang) di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - a) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika belum lah merata dan berimbang. Khususnya pada Bidang Statistik dan Persandian PNS yang dimiliki masih sangat terbatas dalam mendukung kinerja Bidang, dimana hanya ada 2 orang PNS dan 1 orang PPK.
 - b) PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika lebih terpusat pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dengan 5 orang PNS, 2 orang PPPK, Bidang Sekretariat sebanyak 5 orang PNS dan 2 orang PPPK serta Bidang Layanan e-Government sebanyak 4 orang PNS 2 orang PPPK
 - c) Untuk itu ke depan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap

unit kerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan.

Tabel 2.1
Komposisi Penempatan Apartur Per Bidang Lingkup
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Unit Kerja	PNS	PPPK	CPNS	Outsourcing	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	5	2	-	-	7
3	Bidang Layanan e-Government	3	2	1	10	15
4	Bidang Informasi Komunikasi Publik	5	2	-	-	7
5	Bidang Statistik dan Persandian	1	1	1	-	3
	TOTAL	15	7	2	10	33

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari segi penempatan PNS pada jabatan tertentu di Dinas Komunikasi dan Informatika dianggap telah cukup sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dengan demikian PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika bisa dipandang telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup sehingga diharapkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien dalam upaya pencapaian Rencana Strategis (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dan mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya tahun 2024 berdasarkan dokumen Rencana Starategis Dinas Komunikasi dan Informatika Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala telah dapat melaksanakan tugas, dengan gambaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi pemerintah yang Dipublikasikan	Persentase Informasi Dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Persen	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Persen	88%	85.42%	97.07%
3	Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks	1.7	2.31	136%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	70.93	70.07	98.79%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari tabel di atas capaian dari IKU 1 “Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan” dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%, dengan capaian 100%, capaian IKU ini mencapai target 100%, selanjutnya IKU 2 “Persentase Pengelolaan Domain SPBE” dengan realisasi sebesar 85.42% dari target 88%, atau dengan capaian 97.07%, IKU 3 “Indeks Pembangunan Statistik Sektoral” terealisasi sebesar 2.31 atau 136% dari target 1.7, IKU ini melebihi target karena meningkatnya kualitas data statistik sektoral, sedangkan IKU 4 “Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo” dengan terealisasi sebesar 70.07 atau 98.79% dari target sebesar 70.93 IKU ini tidak tercapai sesuai Target karena hasil dari evaluasi SAKIP ada beberapa dokumen SAKIP yang harus diperbaiki. Namun untuk capaian secara keseluruhan IKU di atas 90% sehingga termasuk kriteria sangat baik

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Target Renstra Pada Tahun Ke-						Realisasi Tahun Ke										Rasio Capai pada tahun Ke- 2023-2024	
						2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo		100 31.304.248.645,00	100 3.680.362.794,00	100 4.520.566.265,00	100% 4.201.201.583,00	100% 4.201.201.583,00	100 2.604.720.152,00	100 2.480.019.605,00	60 2.849.943.738,00	100 2.984.498.755,00	100 4.088.330.640,00	1,00 0,23								
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	48 80.411.340,00	20 15.599.040,00	100 31.472.450,00	12 102.393.500,00	12 102.393.500,00	12 102.393.500,00	12 20.314.500,00	60 14.515.400,00	60 13.384.500,00	12 14.348.050,00	12 31.408.413,00	12,25 56,90								
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (SKPD)	48 80.411.340,00	2 15.599.040,00	17 31.472.450,00	12 102.393.500,00	12 102.393.500,00	1 20.314.500,00	2 14.515.400,00	2 13.384.500,00	12 14.348.050,00	17 31.408.413,00	12,35 56,90									
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	48 13.661.563.732,00	20 3.295.442.364,00	12 3.358.911.275,00	12 3.162.375.771,00	12 3.162.375.771,00	12 2.270.695.436,00	60 2.387.327.650,00	60 2.706.644.845,00	12 2.512.564.049,00	12 2.927.667.319,00	12,25 39,82									
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Diskominfo	1446 13.653.563.732,00	312 3.293.602.364,00	336 3.338.673.275,00	336 3.073.297.271,00	336 3.073.297.271,00	26 2.250.380.936,00	26 2.384.924.650,00	26 2.705.017.345,00	247 2.510.724.049,00	289 2.911.729.479,00	247,20 39,71									
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan barang SKPD	48 8.000.000,00	1 1.840.000,00	12 20.238.000,00	12 89.078.500,00	12 89.078.500,00	1 20.314.500,00	2 2.403.000,00	2 1.627.500,00	1 1.840.000,00	12 15.937.840,00	1,25 222,22									
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	100 193.911.750,00	100 78.033.550,00	100 49.156.250,00	100% 48.069.000,00	100% 48.069.000,00	100 14.973.993,00		0,00	100 77.362.452,00	6 49.153.418,00	100,06 65,24									
		Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 193.911.750,00	3 78.033.550,00	4 49.156.250,00	5 48.069.000,00	5 48.069.000,00	2 14.973.993,00			6 77.362.452,00	6 49.153.418,00	6,40 65,24									
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan administrasi umum	100 539.033.450,00	100 183.227.640,00	100 292.198.940,00	100% 419.383.617,00	100% 419.383.617,00	60 81.270.525,00	60 78.176.555,00	60 129.914.393,00	100 181.604.004,00	100 290.407.832,00	101,00 87,57									
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 9.674.090,00	7 2.174.090,00	20 4.368.930,00	7 2.154.090,00	7 2.154.090,00				7 2.153.000,00	20 4.361.250,00	7,54 67,34									
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90 50.202.500,00	23 12.550.550,00	25 22.799.700,00	27 17.932.250,00	27 17.932.250,00	27 11.852.500,00	27 10.946.385,00	27 11.411.610,00	23 12.550.550,00	25 22.674.300,00	23,28 12,98									
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	18.940 114.900.000,00	5325 41.575.000,00	6.675 57.375.000,00	6.675 42.375.000,00	6.675 42.375.000,00	5058 24.131.000	5058 22.180.000,00	5058 21.150.500,00	5255 39.975.000,00	6.675 56.525.000,00	5.255,35 83,99									
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30775 20.888.860,00	7625 5.040.250,00	7.700 10.139.310,00	7.700 5.789.550,00	7.700 5.789.550,00	5359 6.969.700,00	5300 4.981.170,00	4051 5.339.000,00	7675 5.038.600,00	7.700 10.138.470,00	7.675,25 72,66									
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	76 343.368.000,00	16 121.887.750,00	40 197.516.000,00	40 351.132.727,00	40 351.132.727,00	10 38.317.325	10 40.069.000	36 92.013.283	16 121.886.854,00	40 196.708.812,00	16,53 92,79									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	100 450.000.000,00	6 94.250.000,00	100 77.395.400,00	35 141.990.800,00	35 141.990.800,00		0,00		6 93.041.200,00	44 118.352.500,00	6,44 46,98									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 150.000.000,00	6 94.250.000,00	38 41.257.500,00	29 45.391.550,00	29 45.391.550,00					38 41.257.500,00	2,53 27,51									

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Target Renstra Pada Tahun Ke-								Realisasi Tahun Ke										Rasio Capai pada tahun Ke- 2023-2024	
							2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022		2023		2024			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9	150.000.000,0 0			6	77.395.400 ,00	6	141.990.80 0,00	6	141.990.8 00,00							6	93.041.200,00	6	77.095.000,00	6,67	0,51
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	421.519.677,0 0	100	91.930.000, 00	100	112.824.75 0,00	100%	172.480.89 5,00	100%	172.480.8 95,00	60	25.740.654,0 0	60	37.980.000,00	60	64.902.067,0 0	100	81.954.304,00	100	106.027.253,0 0	101,00	0,25
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		48	61.449.600,00	12	14.639.800, 00	12	27.775.000 ,00	12	27.600.000 ,00	12	27.600.00 0,00	400	2.260.000,00	400	15.884.000,00	12	14.659.000,0 0	12	13.080.800,00	12	25.220.000,00	12,25	62,33
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan		48	303.480.000,0 0	12	63.480.000, 00	12	69.460.000 ,00	12	129.050.00 0,00	12	129.050.0 00,00	36	23.480.654,0 0	36	22.096.000,00	36	50.243.067,0 0	12	56.335.704,00	12	66.398.553,00	12,25	40,44
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum dan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor		48	56.590.077,00	12	13.810.200, 00	12	15.589.750 ,00	12	15.830.895 ,00	12	15.830.89 5,00		217.465.698, 00					12	12.537.800,00	12	14.408.700,00	12,25	47,62
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	761.368.747,0 0	100	313.125.360 ,00	100	598.607.20 0,00	100%	154.508.00 0,00	100%	154.508.0 00,00	60	111.423.849, 00	60	100.828.000,00	60	62.106.095,0 0	100	300.049.205,0 0	100,00	565.313.905,0 0	101,00	113,66
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		52	548.739.250,0 0	1	228.804.800 ,00	17	146.437.20 0,00	17	99.138.000 ,00	17	99.138.00 0,00	9,00	48.811.849,0 0	9,00	58.228.000,00	13,00	54.216.095,0 0	13,00	63.282.297,00	17	113.603.273,0 0	13,33	32,23
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi		4	109.829.497,0 0	32	30.130.000, 00	1	426.470.00 0,00	1	31.470.000 ,00	1	31.470.00 0,00	10	57.230.000,0 0	1	42.600.000,00	1	41.106.950,0 0	1	208.276.348,0 0	1	426.010.632,0 0	1,25	577,52
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi		107	102.800.000,0 0	41	54.190.560, 00	9	25.700.000 ,00	9	23.900.000 ,00	9	23.900.00 0,00	1	5.382.000,00			12	7.890.000,00	32	28.490.560,00	9	25.700.000,00	32,08	52,71
2	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan		100	14.575.033.85 0,00	100	3.134.243,3 32,00	100	3.134.243, 332,00	100	2.451.666, 548,00	100	2.451.666, 548,00	100	114.964.546, 00	60	116.901.150,00	60	134.164.100, 00	100,00	1.459.314.773, 00	100,00	1.674.928.559, 00	101,00	21,5041 9247

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Target Renstra Pada Tahun Ke-						Realisasi Tahun Ke										Rasio Capai pada tahun Ke- 2023-2024			
							2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022		2023				2024	
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan		100	14.575.033.850,00	60	3.134.243,32,00	60	3.134.243,332,00	100	2.451.666,548,00	100	2.451.666,548,00	100	114.964.546,00	60	116.901.150,00	60	134.164.100,00	100,00	1.459.314.773,00	100,00	1.674.928.559,00	101,00	21,50
		Sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		48	1.544.445.400,00	24	720.859.400,00	24	720.859.400,00					320	51.687.312,00	310	51.610.000,00	992	42.480.500,00	12	349.117.600,00	12,00	371.741.800,00	12,25	46,67
		Sub kegiatan Penyusunan konten	Jumlah Konten Informasi Publik		480	1.544.445.400,00					240	349.589.824,00	240	349.589.824,00							-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi		48	1.362.535.300,00	24	401.154.532,00	24	401.154.532,00					7	49.959.150,00	7	35.930.000,00	7	50.089.400,00	12	209.678.873,00	12,00	191.475.659,00	12,25	29,44
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi		726	1.362.535.300,00					363	1.830.139.750,00	363	1.830.139.750,00							-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi publik		48	4.175.115.125,00	24	1.940.484,00,00	24	1.940.484,000,00						50	3.172.150,00	100	27.724.400,00	12	876.972.900,00	12,00	1.063.511.100,00	12,25	46,48	
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		402	4.175.115.125,00					201	205.637,574,00	201	205.637,574,00							-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya		240	235.765.800,00	60	62.479.650,00	60	62.479.650,00					1	10.973.334,00	2	26.189.000,00		60	14.279.650,00	201,00	48.200.000,00	60,84	26,50	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan		10	132.598.800,00					5	66.299.400,00	5	66.299.400,00							-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		4	42.477.600,00	1	9.265.750,00	1	9.265.750,00					-	2.344.750,00		100	13.869.800,00	1	9.265.750,00	-		1,00	-	
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Program aplikasi informatika	Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE		100	9.654.908.317,00	84	1.873.480,460,00	84	1.873.480,460,00	93%	3.632.503,770,00	93%	3.632.503,770,00	100,00	1.182.047,086,00	60,00	1.925.152.685,00	100,00	2.007.338,513,00	82,00	1.783.382.394,00	85,00	2.929.739.879,00	167,00	48,82
		Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota			100	200.000.000,00	84	207.936.000,00	84	207.936.000,00	95	2.776.039,020,00	95	2.776.039,020,00	54,00	33.142.963,00	34,00	91.698.475,00		92,00	69.976.000,00	85,00	137.960.000,00	92,85	103,97	
		Sub Kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Panatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota		54	200.000.000,00	108	207.936.000,00	108	207.936.000,00	75	2.776.039,020,00	75	2.776.039,020,00	54,00	33.142.963,00	34,00	91.698.475,00		11,00	69.976.000,00	54,00	137.960.000,00	12,00	103,97	
		Kegiatan pengelolaan e-government lingkup pemerintah daerah kab/kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang baik		75	9.454.908.317,00	60	1.665.544,460,00	60	1.665.544,460,00	70	856.464,750,00	70	856.464,750,00	90,00	1.148.904,123,00	60,00	1.833.454.210,00	60,00	2.007.338,513,00	51,00	1.713.406.394,00	65,00	2.791.779.879,00	51,87	47,65
		Sub kegiatan pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah pusat data pemerintah yang dikelola		1	5.260.078.637,00	1	1.418.443,660,00	1	1.418.443,660,00					600,0	882.625.400,00	600,0	1.451.042.250,00	600,0	1.949.738,513,00	1,0	1.418.443.660,00	1,00	1.993.575.779,00	2,00	64,87

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Target Renstra Pada Tahun Ke-				Realisasi Tahun Ke										Rasio Capai pada tahun Ke- 2023-2024						
							2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022				2023		2024		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		2	531.715.000,00			1	265.857.500,00		1	265.857.500,00								0	-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		16	1.256.610.000,00	3	247.100.800,00	3	247.100.800,00				1,00	266.278.723,00	2,00	382.411.960,00	1,00	49.950.000,00	3,00	247.100.800,00	3,00	168.637.600,00	0,56	33,08		
		Sub Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		6	1.256.610.000,00			3	205.557.500,00	-			3	205.557.500,00					-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen pengelolaan government chief information officer (GCIO)		16	379.795.180,00	4	47.861.934,00	4	47.861.934,00								1,00	7.650.000,00	4,00	47.861.934,00	4,00	629.566.500,00	4,25	178,37		
		Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		8	770.099.500,00			4	385.049.750,00	-			4	385.049.750,00					-	-	-	-	-	-	-	0
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		100	624.035.530,00	100	532.129.025,00	100	532.129.025,00	74,00	250.753.718,00	74,00	250.753.718,00			60,00	23.095.330,00	60,00	23.095.330,00	83,00	240.039.695,00	100,00	125.645.050,00	84,00	58,60	
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah		320	244.905.530,00	320	244.905.530,00	320	244.905.530,00	74	127.598.950,00	74	127.598.950,00			60,00	23.095.330,00	60,00	23.095.330,00	170,00	21.812.000,00	74,00	56.649.250,00	170,23	32,04	
		Sub kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		14	244.905.530,00	14	244.905.530,00	14	244.905.530,00	4		4				40,00	23.095.330,00	40,00	23.095.330,00	1,00	21.812.000,00	4,00	56.649.250,00	1,2857	32,04	
		Kegiatan penetapan pola hubungan antar perangkat daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi		100	379.130.000,00	74	287.223.495,00	74	287.223.495,00	74,00	123.154.768,00	74,00	123.154.768,00						5,00	218.227.695,00	74,00	68.995.800,00	5,74	75,76		
		Sub kegiatan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah/kota	jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi		47	379.130.000,00	47	287.223.495,00	47	287.223.495,00	47		47							4,00	218.227.695,00	47,00	68.995.800,00	5,00	75,76		
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo		100	7.000.000,00	100	-	100	-	100,0	3.557.400,00	100,0	3.557.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu		48	7.000.000,00	24	-	24	-	70	3.557.400,00	70	3.557.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral		10	7.000.000,00					5	Rp 3.557.400,00	5	Rp 3.557.400,00	-	-					-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025-2029

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Target Renstra Pada Tahun Ke-				Realisasi Tahun Ke										Rasio Capai pada tahun Ke- 2023-2024				
							2023	2024		2025	2026	2020		2021		2022		2023		2024					
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	
4	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Satistik Sektoral		2,8	937.374.050,0 0	2,31	151.970.672 ,00	2,31	151.970.67 2,00	1,7	156.661.70 0,00	1,7	156.661.7 00,00				60,00	99.525.234,0 0	1,66	107.779.727,0 0	2,31	86.684.800,00	5,41	20,75
			Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi		90	937.374.050,0 0	70	151.970.672 ,00	70	151.970.67 2,00	70	156.661.70 0,00	70	156.661.7 00,00				60,00	99.525.234,0 0	11,00	107.779.727,0 0	70	86.684.800,00	88,78	20,75
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral		37	285.606.975,0 0	13	151.970.672 ,00	13	151.970.67 2,00								2,00	99.525.234,0 0	1,00	86.392.427,00	12,00	65.573.200,00	33,43	53,21
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100	285.606.975,0 0					80%	76.812.500 ,00	80%	76.812.50 0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		167	183.080.050,0 0	70	42.458.900, 00	70	42.458.900 ,00										30,00	21.387.300,00	40,00	21.111.600,00	53,95	23,21
		Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		167	183.080.050,0 0					30	79.849.200 ,00	30	79.849.20 0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada tataran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala bahwa kelompok sasaran layanan mengarah kepada setiap Perangkat Daerah, Masyarakat dan para penyedia (pihak ke-3) yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa / UKPBJ dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Pengadaan secara elektronik. Adapun yang menjadi layanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. Layanan Smart Presensi (SP) pegawai
 - Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)
 - Perangkat Desa
- b. Layanan Bandwidth Terpusat
- c. Layanan Domain dan Subdomain
- d. Layanan Pengembangan Aplikasi
- e. Layanan Hosting Terpusat
- f. Layanan Command Center
- g. Layanan PPID
- h. Layanan eLapor

2.1.5 Mitra Diskominfo dalam Pemberian Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. Menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDPK);
- c. Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pemrakarsa;
- f. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta menyelesaikan permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Kedua (KSDDPK) serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kerja Sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dengan Pihak Kedua dari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Daftar Kerja Sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Daerah	Mitra Kerja sama	JENIS KERJA SAMA (wajib/sukarela)	SK TKK SD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASABERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kab. Barito Kuala	Perum LKBN Antara									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan Perum LKBN Antara Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/028/MK/Diskominfo/2024	5 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
2	Kab. Barito Kuala	PT. Adiva Putri Kalimantan									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Adiva Putri Kalimantan Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/013/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
3	Kab. Barito Kuala	PT. Alpa Banua Kreasindo									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Alpa Banua Kreasindo Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/017/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
4	Kab. Barito Kuala	PT. Banua Harapan Kita									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Banua Harapan Kita Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/006/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
5	Kab. Barito Kuala	PT. Berkat Bersama Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Berkat Bersama Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/022/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
6	Kab. Barito Kuala	PT. Borneo Trend Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Borneo Trend Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/018/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

No	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (WAJIB/SUKARELA)	SK TTK SD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASABERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Kab. Barito Kuala	PT. Citra Kalimantan Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Citra Kalimantan Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/ /MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
8	Kab. Barito Kuala	PT. Duta Banua Banjar									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Duta Banua Banjar Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/007/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
9	Kab. Barito Kuala	PT. Duta Televisi Indonesia									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Duta Televisi Indonesia Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/033/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
10	Kab. Barito Kuala	PT. Global Mediata Adiguna									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Global Mediata Adiguna Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/015/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
11	Kab. Barito Kuala	PT. Grafika Wangi Kalimantan									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Grafika Wangi Kalimantan Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/003/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
12	Kab. Barito Kuala	PT. Intan Banua Digital									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Intan Banua Digital Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/001/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
13	Kab. Barito Kuala	PT. Jejak Rekam Bhanuwa									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Jejak Rekam Bhanuwa Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/020/ MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

No	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (WAJIB/SUKARELA)	SK TTK SD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASABERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Kab. Barito Kuala	PT. Karya Bakti Banua									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Karya Bakti Banua Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/026/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
15	Kab. Barito Kuala	PT. Klikkalsei Media Mandiri									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Klikkalsei Media Mandiri Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/023/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
16	Kab. Barito Kuala	PT. Lima Putra Firdaus									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Lima Putra Firdaus Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/024/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
17	Kab. Barito Kuala	PT. Media Banjar Group									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Banjar Group Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/030/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
18	Kab. Barito Kuala	PT. Media Cipta Banua									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Cipta Banua Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/027/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
19	Kab. Barito Kuala	PT. Media Digital Gemilang									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Digital Gemilang Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/002/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
20	Kab. Barito Kuala	PT. Media Jaya Group									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Jaya Group Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/010/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak

RENSTRA DISKOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025-2029

No	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (WAJIB/SUKARELA)	SK TTK SD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASABERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Kab. Barito Kuala	PT. Media Jaya Group									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Jaya Group Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/011/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
22	Kab. Barito Kuala	PT. Media Lentera Kalimantan									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Lentera Kalimantan Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/031/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
23	Kab. Barito Kuala	PT. Media Poros Banuakita									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Media Poros Banuakita Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/029/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
24	Kab. Barito Kuala	PT. Panca Kalimantan Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Panca Kalimantan Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/016/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
25	Kab. Barito Kuala	PT. Pojok Berita Indoensia									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Pojok Berita Indoensia Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/034/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
26	Kab. Barito Kuala	PT. Pojok Digital Banua									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Pojok Digital Banua Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/021/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
27	Kab. Barito Kuala	PT. Rilis Media Siber									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Rilis Media Siber Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/014/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak

No	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (WAJIB/SUKARELA)	SK TTK SD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASABERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Kab. Barito Kuala	PT. Shalokal Mediata Indonesia									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Shalokal Mediata Indonesia Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/019/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
29	Kab. Barito Kuala	PT. Sinar Insan Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Sinar Insan Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/012/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
30	Kab. Barito Kuala	PT. Teras Tujuh Indonesia									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Teras Tujuh Indonesia Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/025/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
31	Kab. Barito Kuala	PT. Trimedia Makmur Jaya									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Trimedia Makmur Jaya Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/035/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak
32	Kab. Barito Kuala	PT. Wahana Karya Media									Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala dengan PT. Wahana Karya Media Tentang Jasa Publikasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	Nomor : 027/009/MK/Diskominfo/2024	1 Februari 2024	6 Bulan		Habis Masa Berlaku	Mengoptimalkan Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah maupun SKPD	Para Pihak

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Implementasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang memungkinkan tercapai atau tidaknya kinerja secara optimal. Dalam pembahasan sub bab ini akan lebih berfokus pada analisis faktor penghambat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan utama Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :
 - a. Penerapan e-Government sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
 - b. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/website, data;
 - b. Belum adanya standar keamanan informasi;
 - c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TIK;
 - d. Kurangnya peningkatan kompetensi SDM pengelola TIK dan SDM pengelola Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi belum memadai.
 - f. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - g. Sarana dan prasarana pendukung media informasi dan komunikasi publik belum memadai.
 - h. Belum tersedianya stok peralatan jaringan untuk kegiatan

maintenance/perbaiki.

- i. Belum optimalnya diseminasi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.
 - j. Belum optimalnya sistem penghubung layanan pemerintah.
 - k. Belum optimalnya penyediaan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
2. Urusan Pemerintah Bidang Persandian Berkaitan dengan Bidang Persandian tidak lepas juga dari kaitannya dengan keamanan informasi karena setelah penataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup Persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah surat elektronik dan pengamanan informasi. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan :
- a. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumendokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas.
 - c. Belum optimalnya pengamanan dan data informasi daerah.
 - d. Belum terinventarisirnya jaringan dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Batola dengan baik;
 - e. Selanjutnya untuk pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien lagi dirasakan masih perlu dioptimalkan.
 - f. Berkaitan dengan sumber daya manusia pun perlu peningkatan kualitas berkaitan dengan disiplin keilmuan yang relevan dengan persandian dan keamanan informasi.
 - g. Belum optimalnya kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

3. Urusan Pemerintah Bidang Statistik Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:
- a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh seksi statistik karena belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah sehingga supply data masih rendah;
 - b. Masih kurangnya Koordinasi Tim Forum Data Kabupaten;
 - c. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
 - d. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;
 - e. Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - f. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah;
 - g. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok fungsi serta peran wali data sektoral Pemerintah Kab. Batola;
 - h. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mensupply data tepat waktu;
 - i. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.
 - j. Belum optimalnya penggunaan data statistik sektoral sebagai PD yang dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif secara internal antara lain :

- a) Belum dilaksanakannya evaluasi dan sosialisasi terhadap beban kerja dan analisis jabatan setiap jabatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan kinerja yang diinginkan.

- b) Masih sedikitnya Bidang-bidang yang menerapkan system data base dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- c) Masih rendahnya unit kerja yang menerapkan SOP dalam pelaksanaan kegiatan.
- d) Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya membuat laporan kinerja secara tertulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam suatu sistematika penyajian yang runtun dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
- e) Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bidang-bidang kurang merata.
- f) Kurang memadainya prasarana kerja terutama computer/laptop yang belum sepenuhnya dimiliki pejabat struktural dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur
- g) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan.
- h) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
- i) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
- j) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
- k) Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai
- l) komputer
- m) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
- n) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1) Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak dibarengi dengan aturan pelaksanaan yang jelas sehingga menimbulkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

- 2) Adanya tuntutan target kinerja dari pemerintah lebih tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakannya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;
4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;
5. Pelayanan transportasi publik masih rendah;
6. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negativeterhadap flora dan fauna yang di lindungi);
7. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
8. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi

pembangunan Kabupaten Barito Kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal;

9. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian di Komunikasi dan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
3. Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
4. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
5. Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai komputer
6. Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
7. Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
8. Belum tersedianya layanan informasi dan komunikasi secara lengkap
9. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi belum memadai
10. Belum terselenggaranya system komunikasi dan informasi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
11. Belum maksimalnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien, transparan, professional, dan akuntabel

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
3. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
4. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik
5. Belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi

Dalam pencapaian tujuan maka diperlukan strategi dan kebijakan efektif yang akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tantang dan peluang Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 yang dimaksud adalah :

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan/*Strenght* (S)

- a) Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
- b) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang : Pemerintahan Daerah

mengatur tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah: RPJP Daerah, RPJM Daerah (RPJMD), dan RKPD.

- d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1) Peluang/*Opportunity* (O)

- a) Penerapan teknologi informasi dalam Sistem informasi, khususnya dalam pemerintahan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan membantu dalam proses pengolahan data dengan menggunakan sistem pengolahan basis data atau database yang cepat terutama dalam mewujudkan keterbukaan pelayanan publik dan kemudahan pemberian pelayanan.
- b) Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah maka setiap 2 tahun Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, hal ini dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan organisasi perangkat daerah.

2) Ancaman/*Treaths* (T)

- a) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
- c) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
- d) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian di Komunikasi dan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional yang sangat dibutuhkan.
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
4. Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
5. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
6. Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai komputer
7. Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
8. Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggarandaerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
3. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

4. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

2.2.2. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan dari beberapa yang telah dilakukan meliputi :

1. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
2. Permasalahan perangkat daerah
3. Isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah
4. Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah baik global, Nasional maupun regional

Adapun potensi, permasalahan Perangkat daerah serta isu-isu yang relevan dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.5
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi daerah untuk mempercepat transformasi Digital, keandalan data dan keamanan informasi melalui pelayanan publik: 1. Infrastruktur Akses Digital dan Konektivitas: 2. Platform dan Aplikasi: 3. Digitalisasi Layanan Terintegrasi: 4. Sumber Daya Manusia (SDM): 5. Data dan Keamanan Informasi: 6. Kemitraan : 7. Regulasi dan Kebijakan: 8. Media Pemerintah dan Media Kerjasama 9. Portal data Batola (satu data.baritokualakab.go.id) 10. Tim Tanggap Insiden Siber 11. Penatausahaan Kearsipan 12. PPID, SP4N lapor dan KIM 13. Layanan command center 14. Pengelolaan Statistik Sektoral	1. Infrastruktur dan Aksesibilitas: 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Digital belum merata: 3. Rawannya Keamanan dan Privasi Data: 4. Rendahnya Literasi Digital yang menyasar berbagai kelompok masyarakat 5. Belum tersedianya Digitalisasi layanan yang terintegrasi karena minimnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur 6. Pembinaan kepada PPID Pelaksana Perangkat Daerah PPID Kabupaten dan PPID Pelaksana belum terlaksana secara optimal. 7. Pemahaman dan Partisipasi masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih relatif rendah.	1. Transformasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. 2. Pengamanan perangkat Sistem Elektronik, Infrastruktur pendukung dan perangkat pengolahan data dan informasi terhadap kemungkinan bencana banjir yang terjadi pada instansi yang berada di wilayah rawan banjir	1. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Digital 2. Perkembangan Teknologi yang Cepat 3. Tantangan Integrasi Layanan Publik 4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data 5. Kesenjangan Digital dan Aksesibilitas Layanan 6. Perubahan Ekspektasi Masyarakat 7. Adaptasi dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesiapan Masyarakat 8. Pendanaan dan Keberlanjutan Program Digitalisasi 9. Tren Ekonomi Digital dan E-Commerce 10. Perubahan Perilaku Konsumen 11. Pemanfaatan AI dalam analisis statistik sektoral	1. Regulasi dan Kebijakan yang Terus Berkembang 2. Kesiapan Infrastruktur Digital 3. Interoperabilitas dan Integrasi Layanan 4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data 5. Literasi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) 6. Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Publik Digital 7. Keberlanjutan dan Pendanaan Transformasi Digital 8. Tingkat Literasi Digital 9. Akses Internet dan Infrastruktur Digital yang Belum Merata 10. Digitalisasi UMKM 11. Perubahan Perilaku Konsumen ke Arah Digital	1. Komitmen Kepemimpinan dalam Digitalisasi 2. Kesiapan Infrastruktur Digital 3. Kapasitas SDM dalam Transformasi Digital 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Digital 5. Ketimpangan Akses Digital antar Kecamatan 6. Literasi Digital, keamanan digital, etika digital, serta manfaat teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan ekonomi. 7. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat ke Arah Digital 8. Peningkatan Digitalisasi Layanan Terintegrasi 9. Ancaman Keamanan Siber dan Penyebaran Hoaks 10. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan/Stakeholder 11. Peningkatan Partisipasi Publik dalam keterbukaan Informasi dan Komunikasi	Belum Optimalnya Pelayanan Publik Berbasis Digital dan terintegrasi, kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi publik, Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

8. Tata Kelola Layanan Informasi Publik belum sepenuhnya terintegrasi.		12. Meningkatnya penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko cyber attack, data breach, dan penyalahgunaan data pribadi.	12. Tingginya angka pengguna aplikasi judi online dan transaksi Pinjaman Online secara ilegal	Publik serta pelaporan kebutuhan pelayanan publik secara digital
9. Banyaknya Sistem Elektronik yang belum dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan risiko Insiden Siber		13. Tantangan pengelolaan data	13. Banyak terjadi tindak kejahatan social engineering dengan berbagai metode, seperti phishing, spam ataupun pretexting	12. SDI dalam mendukung pengembangan e-Government dan platform pelayanan publik digital untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan.
10. Masih rendahnya kesadaran pengguna aplikasi tentang pentingnya menerapkan pengamanan terhadap data dan informasi pribadi maupun Instansi			14. Tantangan pengelolaan statistik sektoral	13. Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses Internet
11. Terbatasnya sarana dan prasarana publikasi				14. Survey Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan Diskominfo
12. Belum tersedianya gedung khusus penyimpanan arsip				15. Meningkatnya penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko cyber attack, data breach, dan penyalahgunaan data pribadi
13. Belum adanya istem layanan Batola Respon Cepat				16. Layanan command center
14. Belum optimalnya Pelayanan Infrastruktur dan Teknologi Informasi				17. Keberlanjutan dan Pendanaan Transformasi Digital
15. Belum Optimalnya Penguatan SDM dan Literasi Digital				18. Tantangan pengelolaan statistik sektoral
16. Belum Optimalnya Pengelolaan Keamanan Data dan Sistem				
17. Belum Optimalnya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik				

Dari tabel di atas maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

“Belum Optimalnya Pelayanan Publik Berbasis Digital Dan Terintegrasi, Kualitas Infrastruktur Informasi Dan Komunikasi Publik, Statistik Sektoral Dan Keamanan Informasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital masih belum optimal, baik dari aspek ketersediaan jaringan, perangkat, maupun sistem aplikasi yang terintegrasi. Pelayanan publik digital yang seharusnya memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan kapasitas infrastruktur serta belum terhubungnya sistem antar-perangkat daerah. Akibatnya, proses pelayanan masih berjalan secara manual atau parsial, sehingga efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Pengelolaan data dan informasi sektoral yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah sering kali belum terintegrasi, tidak mutakhir, serta

belum memenuhi prinsip interoperabilitas dan standar satu data Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan koordinasi antar-instansi menyebabkan kualitas layanan statistik sektoral belum dapat mendukung kebutuhan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif. Perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah di tengah meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Keamanan informasi dan penerapan sistem persandian yang kuat menjadi faktor kunci dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Belum optimalnya kebijakan keamanan siber, infrastruktur enkripsi, serta kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data menyebabkan tingginya potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi dan persandian sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpercaya, efisien, dan berdaya saing di era digital.

Dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika sesuai dengan tupoksinya melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatnya kualitas infrastruktur Pelayanan Publik Berbasis Digital dan terintegrasi, Kualitas Layanan Statistik Sektoral, dan Mewujudkan Keamanan Informasi dan Persandian dalam mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 dimana Kabupaten Barito Kuala harus menyusun RPJMD sehubungan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada Februari 2025 dari hasil Pilkada yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Di dalam peraturan tersebut diatur untuk Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RPJMD memuat visi misi yang disesuaikan dengan RPJPD Kab. Barito Kuala. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045, maka telah ditetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas”.

SATU merupakan akronim yang mengandung makna filosofis mendalam sebagai cita-cita pembangunan Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

1. Sejahtera :

- a. Bermakna tercapainya taraf hidup masyarakat Barito Kuala yang makmur secara ekonomi. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi agraris yang sangat besar dengan lahan persawahan yang luas dan subur di sepanjang aliran Sungai Barito. Kesejahteraan bagi masyarakat Barito Kuala bermakna pemberdayaan potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi mayoritas penduduk, sehingga hasil produksi pertanian dapat memberi nilai tambah optimal bagi petani lokal.
- b. Mengandung semangat pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karakteristik geografis Barito Kuala yang didominasi oleh lahan basah dan rawa pasang surut menuntut penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama akses terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Peningkatan kesejahteraan juga bermakna diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan agroindustri dan produk turunan pertanian yang sesuai dengan kondisi khas Barito Kuala.
- c. Mencerminkan kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan yang merata. Penduduk Barito Kuala yang tersebar di berbagai kecamatan dengan tingkat konektivitas yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang memastikan distribusi kesejahteraan tidak terpusat pada satu kawasan saja. Ini termasuk penjaminan akses pasar bagi produk lokal, fasilitas kredit mikro bagi usaha kecil, dan program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh hingga kawasan perdesaan terpencil di daerah aliran sungai.

2. Agamis

- a. Merepresentasikan masyarakat Barito Kuala yang menjunjung tinggi nilai nilai religius. Penduduk Barito Kuala memiliki karakteristik religius yang kuat dengan mayoritas beragama Islam, tercermin dari banyaknya rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah yang tersebar di seluruh kabupaten. Penguatan karakter agamis berarti memperkuat peran lembaga-lembaga keagamaan ini sebagai pusat pembinaan moral dan etika masyarakat, serta memastikan nilai-nilai keagamaan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran sebagai landasan moral pembangunan. Meskipun mayoritas beragama Islam, masyarakat Barito Kuala juga dihuni oleh pemeluk agama lain yang hidup berdampingan secara harmonis. Karakteristik sosial-budaya masyarakat Barito Kuala yang dipengaruhi oleh budaya Banjar dan Dayak telah membentuk pola interaksi sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan daerah.
- c. Penguatan nilai-nilai spiritual yang menjadi karakteristik dan identitas masyarakat Barito Kuala. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, Haul, dan berbagai ritual keagamaan lainnya telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Barito Kuala. Nilai-nilai spiritual ini juga tercermin dalam kearifan lokal dalam mengelola lahan pasang surut dan rawa melalui sistem "handil" yang mengatur pengairan sawah. Pelestarian dan penguatan nilai-nilai ini menjadi penting sebagai penyeimbang terhadap modernisasi dan pembangunan ekonomi.

3. Terpadu

- a. Mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antar sektor dan wilayah. Karakteristik geografis Barito Kuala yang terdiri dari kawasan hulu, tengah, dan hilir dengan perbedaan tantangan pembangunan yang signifikan memerlukan pendekatan pembangunan terpadu. Kawasan hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar memiliki potensi perkebunan, kawasan tengah dengan potensi pertanian padi, dan kawasan hilir yang berbatasan dengan laut memiliki potensi perikanan dan tambak. Pendekatan terpadu berarti mengintegrasikan seluruh potensi ini dalam satu kesatuan pembangunan yang saling mendukung.
- b. Menciptakan konektivitas yang menghubungkan seluruh wilayah Barito Kuala sehingga tidak ada daerah yang terisolasi. Tantangan utama Barito Kuala adalah karakteristik wilayahnya yang membelah oleh Sungai Barito dan banyaknya anak sungai yang menyulitkan aksesibilitas darat. Banyak desa yang masih sangat bergantung pada

transportasi air. Pembangunan terpadu berarti mengembangkan sistem transportasi multimodal yang mengintegrasikan transportasi darat dan air, sehingga seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif.

- c. Pembangunan yang sinergis antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kondisi ekosistem Barito Kuala yang didominasi lahan basah memerlukan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus memperhatikan karakteristik lahan gambut dan rawa yang rentan, serta pola kehidupan masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi ini selama berabad-abad. Sinergi ini juga berarti mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan teknologi modern dalam pembangunan daerah.

4. Unggul

- a. Mewujudkan Barito Kuala yang kompetitif dan memiliki keunggulan komparatif. Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dalam produksi padi pasang surut dan buah-buahan lokal seperti jeruk siam yang khas. Letak geografisnya yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan relatif dekat dengan rencana Ibu Kota Nusantara merupakan potensi besar untuk pengembangan kawasan penyangga dan pendukung logistik. Keunggulan ini perlu dikembangkan melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan pengembangan sentra-sentra ekonomi strategis yang menonjolkan karakteristik khas Barito Kuala.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Penduduk Barito Kuala yang didominasi oleh usia produktif memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi SDM unggul. Tantangan utamanya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan. Keunggulan SDM Barito Kuala perlu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik lokal, seperti keterampilan dalam budidaya pertanian pasang surut, pengolahan hasil pertanian, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan rawa yang dapat diintegrasikan dengan pengetahuan modern.
- c. Peningkatan layanan publik yang berkualitas dan inovatif. Kondisi geografis Barito Kuala dengan banyaknya wilayah yang sulit dijangkau memerlukan inovasi dalam penyediaan layanan publik. Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan perlu dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan transportasi darat dan infrastruktur di beberapa kawasan. Inovasi seperti layanan terapung atau bergerak dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok Barito Kuala.

- d. Pemantapan sistem dan kelembagaan yang efektif dan efisien. Karakteristik masyarakat Barito Kuala yang masih kuat memegang sistem nilai tradisional memerlukan pendekatan kelembagaan yang mengintegrasikan struktur formal pemerintahan dengan lembaga lembaga informal dan kearifan lokal. Sistem pengelolaan "handil" (sistem irigasi tradisional) dan kelembagaan adat perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem pemerintahan formal untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Frasa **“Menuju Indonesia Emas”** memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari cita-cita besar Indonesia. Ini mengandung arti:

- a. Kontribusi nyata Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan kejayaan Indonesia di masa depan. Dengan potensi sebagai lumbung pangan nasional dan kawasan penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara, Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wilayah di Kalimantan. Karakteristik khas Barito Kuala sebagai daerah penghasil padi dengan teknologi budidaya pasang surut yang unik dapat menjadi model pengembangan lahan marginal di seluruh Indonesia, memberikan kontribusi nyata bagi inovasi pertanian nasional.
- b. Pembangunan daerah yang mempersiapkan Barito Kuala menjadi bagian strategis dalam peta pembangunan nasional. Letak geografis Barito Kuala yang berada pada jalur strategis transportasi sungai Barito dan dekat dengan rencana pengembangan wilayah Kalimantan, menempatkan Barito Kuala pada posisi penting dalam konektivitas regional. Pengembangan infrastruktur dan sistem logistik di Barito Kuala akan berdampak pada penguatan konektivitas nasional, terutama untuk kawasan Kalimantan.
- c. Optimisme bahwa kemajuan Barito Kuala akan turut mendorong kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan Barito Kuala yang berhasil dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan modernisasi, serta mampu mengelola ekosistem rawa secara berkelanjutan, dapat menjadi model pembangunan untuk kawasan-kawasan serupa di Indonesia. Keberhasilan ini akan memberikan sumbangsih terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju yang tetap mempertahankan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, penggunaan kata "SATU" juga mengandung filosofi persatuan dan keutuhan. Ini mencerminkan:

- a. Kesatuan tekad dan langkah seluruh elemen masyarakat Barito Kuala dalam

pembangunan. Masyarakat Barito Kuala yang terdiri dari berbagai 337 kelompok etnis (Banjar, Dayak, Jawa pendatang) telah hidup berdampingan dengan harmonis. Filosofi "SATU" menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman ini sebagai modal sosial utama pembangunan. Karakteristik masyarakat Barito Kuala yang mengedepankan musyawarah dan gotong-royong merupakan perwujudan nilai kesatuan yang telah tertanam dalam kehidupan sosial sehari-hari.

- b. Integrasi berbagai potensi daerah menjadi satu kekuatan bersama. Kabupaten Barito Kuala memiliki keragaman potensi alam yang luar biasa, mulai dari lahan pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi wisata berbasis rawa dan sungai. Filosofi "SATU" menggambarkan upaya mengintegrasikan seluruh potensi ini menjadi satu kesatuan pembangunan yang saling memperkuat. Pengembangan potensi pertanian tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, demikian pula pembangunan infrastruktur harus mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal.
- c. Harmonisasi pembangunan yang mencakup aspek material (ekonomi, infrastruktur) dan immaterial (spiritual, sosial-budaya). Masyarakat Barito Kuala memiliki kekayaan nilai-nilai spiritual dan kultural yang telah menjadi panduan hidup selama berabad-abad. Filosofi "SATU" menegaskan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi harus selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan kultural. Kemajuan teknologi dan modernisasi harus dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal, sehingga tercipta pembangunan yang utuh dan berkelanjutan. Visi Terwujudnya "Barito Kuala SATU" menuju Indonesia Emas, merupakan landasan konseptual yang komprehensif dan fundamental, yang dijadikan panduan dalam perumusan misi, strategi, dan program pembangunan daerah. Setiap komponen SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) memiliki spektrum luas yang dapat dijabarkan ke dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, dengan tetap menekankan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai fondasi.

Adapun Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sebagai penjabaran operasional dari visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas", misi Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan daerah, serta memperhatikan kondisi aktual dan tantangan yang dihadapi. Misi berfungsi sebagai penghubung antara visi yang bersifat ideal dengan program-program pembangunan yang lebih konkret. Melalui rumusan misi yang jelas, seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun ke depan.

Perumusan misi juga mempertimbangkan asas kesinambungan pembangunan dengan tetap membuka ruang untuk inovasi dan terobosan baru sesuai dinamika kebutuhan masyarakat. Berikut adalah misi Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 yang ditetapkan untuk mewujudkan visi daerah meliputi:

1. Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur.
2. Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri Berbasis Inovasi.
3. Mengembangkan Konektivitas Wilayah–Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara.
4. Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital
5. Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2025 -2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

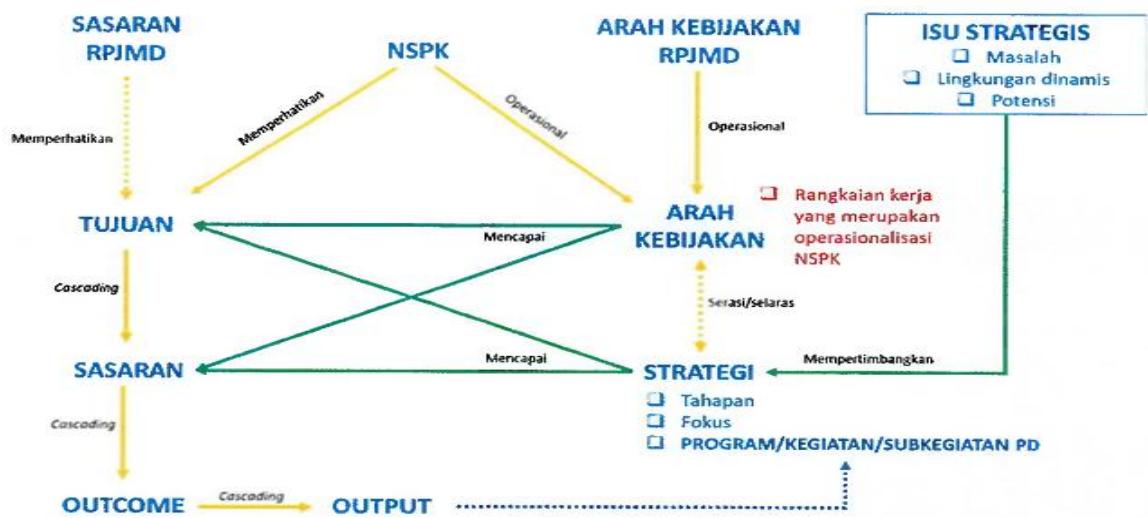
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke- 4 dan dalam RPJMD yaitu “Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital”.

3. 2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.barito Kuala Tahun 2025-2029

Dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa konsep Rencana Strategis serta kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut :

Gambar 3.1

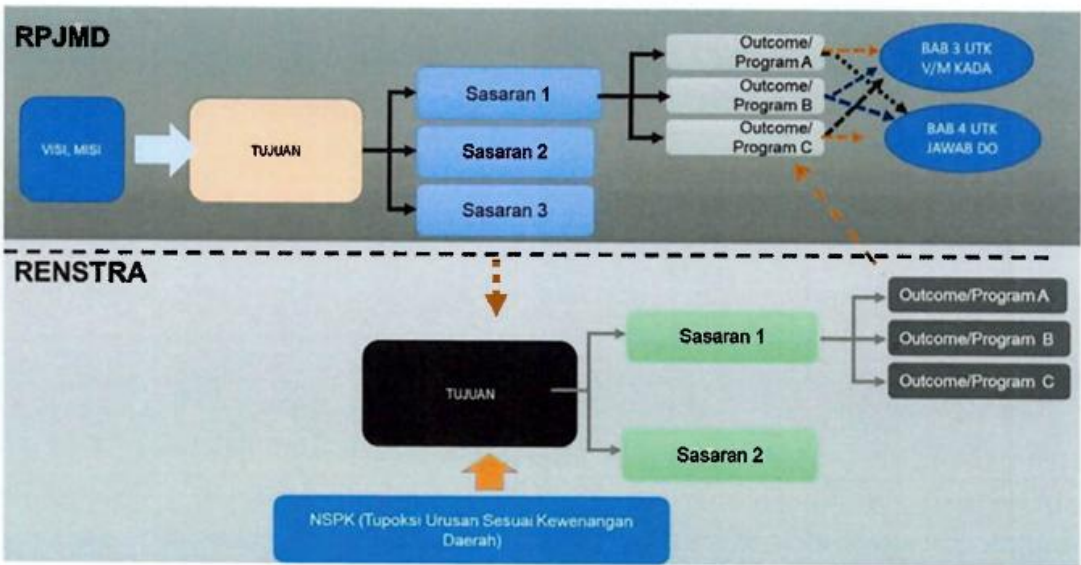
Konsep Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber Data : Inmendagri 2 Tahun 2025

Gambar 3.2

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber Data : Inmendagri 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambaran konsep Rencana Strategis serta kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Permen Kominfo No. 8/2019 tentang urusan kunkuren Bidang Kominfo; Perpres No. 95/2018 tentang SPBE; Perpres No.53/2017 tentang BSSN; Peraturan BSSN No. 4/2021 tentang Pedoman Keamanan Siber M3.1.1. Meningkatnya kuatitas insfrastruktur; M4.1.2 Optimalnya tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dan terintegrasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi publik, Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi dalam mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Elektronik (SPBE)	Indeks	3,70	-	-	-	-	-	2026 diganti dengan Indeks PEMDI
			Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	-	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2026 diganti dengan Indeks PEMDI
			Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	
			Indeks KAMI	Indeks	425	450	475	500	525	550	
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala	Persentase meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat	Persen	75	78	82	86	91	95	
			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	10,13	18,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
		Meningkatnya PD yang menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	51	60	70	73	76	79	

3. 3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Mencapai Tujuan , Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis, maka dibutuhkan rencana dan tindakan yang komprehensif memberikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan. Berkaitan dengan strategis dan arah kebijakan terhadap Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tahapan-tahapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Awal dan Integrasi Portal Layanan Pengembangan dan penyediaan aplikasi layanan dasar publik Pengembangan Portal Pelayanan Terpadu Edukasi digitalisasi kepada OPD dan Masyarakat	Peningkatan Interoperabilitas Layanan Integrasi aplikasi lintas OPD Implementasi Single Sign-On (SSO) Penguatan keamanan sistem (cybersecurity)	Penguatan Layanan Digital Berbasis Mobile dan AI Pengembangan layanan mobile apps pemerintah Otomatisasi layanan dengan chatbot/AI Survei kepuasan layanan digital	Optimalisasi dan Layanan Berbasis Data Dashboard publik layanan pemerintah Integrasi data ke dalam sistem pengambilan keputusan Pemanfaatan AI untuk respons layanan	Transformasi Layanan Publik yang Adaptif dan Cerdas Evaluasi total transformasi layanan Implementasi layanan digital proaktif dan preskriptif Sertifikasi keamanan layanan digital
Implementasi Sistem Tata Kelola Berbasis Digital Penerapan e-office, e-kinerja, dan SIMPEG Monitoring reformasi birokrasi sektor informasi Peningkatan kapasitas manajemen risiko OPD	Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik Evaluasi layanan PPID Optimalisasi website dan kanal informasi resmi Survei keterbukaan informasi public	Peningkatan Kualitas Layanan Internal dan Eksternal Inovasi pelayanan publik berbasis digital Sistem pengaduan dan feedback masyarakat terpadu Penguatan budaya kerja berbasis kinerja	Penguatan Keamanan dan Validasi Data Audit kualitas data sektoral Penetapan standar verifikasi dan akurasi data Sertifikasi kompetensi pengelola data daerah	Diskominfo sebagai Role Model Tata Kelola Modern Evaluasi capaian reformasi birokrasi Diskominfo Benchmarking dan sertifikasi ISO manajemen Implementasi sistem pengelolaan agile & adaptif

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital	Meningkatkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Dengan digitalisasi yang lebih luas, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan dapat terus berkembang secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.	Pengadaan dan Pengembangan, implementasi, dan pengelolaan SPBE, termasuk keamanan, privasi, akses, pengelolaan data, integrasi, pengembangan kapasitas, pengawasan, kerja sama, insprastruktur, TIK, aplikasi, pelaksanaan rapat Koordinasi, peningkatan SDM dan pengadaan sarana penilaian serta penyediaan tenaga ahli	
			Pengelolaan media center (website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online, kerjasama media) pembuatan konten, pengelolaan layanan penganduan PPID, SPAN LAPOR, pembentukan/pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi publik, sosialisasi internet sehat, Rakor/FGD, peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik	
			Penyelenggaraan forum satu data daerah, melaksanakan koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan statistik, meningkatkan sumberdaya statistik	
			Pengadaan sarana prasarana persandian, fasilitasi layanan persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian,	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Diskominfo setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kab. Barito Kuala. Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Diskominfo Kab. Barito Kuala menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan beberapa Subbab dibawah ini.

4.1. Uraian Program Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

Salah satu bagian kunci adalah Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Diskominfo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Diskominfo Kab. Barito Kuala adalah sebagai berikut :

a. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, partisipasi,

dan kepercayaan publik. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Program ini bertujuan Meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada Masyarakat agar untuk memperkuat peran komunikasi publik sebagai sarana penyampaian kebijakan, program, dan capaian Pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kanal, komunikasi yang efektif, dan mendukung keterbukaan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

Program ini melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik yaitu Penyusunan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Penguatan portal keterbukaan informasi publik dan layanan PPID, dan melaksanakan komunikasi publik dengan Publikasi berita, artikel, dan konten kreatif tentang kebijakan dan capaian pembangunan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial resmi pemerintah daerah. Penyelenggaraan kegiatan tatap muka, dialog publik, dan sosialisasi program. Pengelolaan Media, Kerja sama dengan media massa dalam penyebaran, informasi, monitoring dan analisis opini publik di media, Pengelolaan Layanan Aduan dan Aspirasi Masyarakat dengan Penyediaan kanal pengaduan online/offline, Respon cepat terhadap pertanyaan masyarakat melalui media sosial resmi. Peran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terhadap Pencapaian Renstra untuk mendukung indikator kinerja utama, memastikan informasi pembangunan tersampaikan dengan tepat sasaran, sehingga tingkat kepuasan masyarakat, dan partisipasi publik dapat tercapai sesuai target Renstra, meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dengan penyampaian informasi yang terbuka, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah sesuai rencana pembangunan jangka menengah, Memperkuat Branding dan Citra Positif Pemerintah Daerah dengan penyebarluasan informasi yang terarah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Mengintegrasikan Sistem Informasi dan Kanal Komunikasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi publik.

Dengan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diharapkan tersedianya informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses, meningkatnya literasi masyarakat terhadap program pemerintah, terwujudnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat serta terpenuhinya target kinerja Renstra pada bidang informasi dan komunikasi publik.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika merupakan langkah strategis

pemerintah daerah dalam mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Program ini berorientasi pada tercapainya sasaran dan indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Tujuan Program ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, meningkatkan integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), menjamin keamanan, keberlanjutan, dan pengembangan sistem aplikasi sesuai kebutuhan daerah.

Program ini melaksanakan pengembangan aplikasi pemerintah daerah dengan membangun dan memperbarui aplikasi layanan publik berbasis web atau mobile, menyediakan fitur layanan administrasi pemerintahan digital. Integrasi dan interoperabilitas sistem yaitu dengan ntegrasi antar sistem informasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), penyediaan Single Sign-On (SSO) untuk akses berbagai aplikasi. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan aplikasi dengan perawatan, pembaruan, dan optimalisasi aplikasi yang telah ada, monitoring kinerja dan kehandalan sistem secara berkala. Melaksanakan manajemen data dan keamanan informasi dengan penguatan pusat data dan keamanan aplikasi, backup dan pemulihan data untuk menjamin keberlanjutan layanan. Peningkatan Kapasitas SDM dengan pelatihan operator, admin, dan pengelola aplikasi pemerintah daerah. Dengan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diharapkan dapat mendukung pencapaian renstra yaitu adanya efisiensi dan transparansi, aplikasi yang terintegrasi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi biaya operasional dan memperkuat transparansi sesuai indikator kinerja Renstra. Mempercepat Transformasi Digital Pemerintahan dengan aplikasi yang andal, pemerintah daerah dapat mencapai target implementasi e-Government dan smart city sesuai Renstra. memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan sistem berbasis aplikasi memudahkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan capaian kinerja Renstra. Meningkatkan Kepuasan dan Partisipasi Publik dengan layanan berbasis aplikasi yang mudah diakses mendorong masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelayanan dan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan melalui program ini tersedianya aplikasi pemerintah daerah yang andal, aman, dan terintegrasi, meningkatnya efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan akuntabel, terpenuhinya indikator kinerja Renstra di bidang aplikasi informatika dan transformasi digital.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan program strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan berkesinambungan. Program ini penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sesuai sasaran dan indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra). Tujuan Program yaitu Menyediakan data dan informasi statistik sektoral yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dan pemutakhiran data sektoral, mendorong keterpaduan sistem data sektoral daerah dengan data nasional, mendukung perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kegiatan yang dilaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral adalah penyusunan dan pemutakhiran data statistik sektoral dengan penyusunan metadata dan indikator sektoral sesuai bidang urusan pemerintahan daerah, pemutakhiran rutin data sektoral oleh OPD terkait. Pengembangan Sistem Informasi Statistik Sektoral dengan Pembangunan/peningkatan aplikasi atau portal data sektoral daerah, integrasi data sektoral ke sistem nasional (Satu Data Indonesia). Koordinasi dan Pembinaan Statistik Sektoral dengan Pendampingan teknis OPD terkait pengumpulan dan pengolahan data sektoral, Fasilitasi penyusunan dokumen statistik sektoral (metadata, SDI). Analisis dan Diseminasi Data Statistik dengan Analisis tren dan capaian indikator sektoral, publikasi data sektoral kepada masyarakat secara berkala. Peningkatan Kapasitas SDM Statistik dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola data sektoral OPD.

Dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral diharapkan agar menjadi dasar Perencanaan Berbasis Data yaitu data sektoral yang lengkap dan valid menjadi dasar penyusunan Renstra dan RPJMD, serta mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Daerah dengan Statistik sektoral memungkinkan pemantauan capaian indikator kinerja utama dan target Renstra secara obyektif. Integrasi Data Sektoral dengan Nasional dapat memastikan keterpaduan data daerah dengan sistem nasional sehingga menghasilkan data yang sinkron dan terpercaya. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas dengan publikasi statistik sektoral secara terbuka meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, meningkatnya pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. terwujudnya satu data daerah yang selaras dengan Satu Data Indonesia, serta terpenuhinya indikator kinerja Renstra pada bidang statistik sektoral.

- e. Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi merupakan program strategis pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi milik pemerintah. Program ini penting untuk mendukung implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), keterbukaan informasi publik yang aman, serta perlindungan data strategis daerah. Dengan penyelenggaraan persandian yang baik, target-target yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dapat tercapai dengan lebih efektif dan aman.
- Program ini bertujuan meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan dengan mengembangkan sistem persandian yang sesuai standar nasional dalam melindungi data dan komunikasi elektronik, memastikan keandalan, kerahasiaan, dan integritas data pemerintahan yang mendukung pencapaian indikator Renstra, menguatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keamanan informasi dan persandian,
- Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Persandian dengan pengoperasian perangkat lunak dan perangkat keras pengamanan informasi, monitoring rutin terhadap sistem persandian. Pengamanan Jaringan dan Data Elektronik dengan implementasi enkripsi pada data dan komunikasi elektronik pemerintah daerah, perlindungan data sensitif dan informasi strategis dari ancaman siber. Penyusunan Kebijakan dan Standar Operasional dengan penyusunan pedoman teknis pengamanan informasi dan persandian sesuai regulasi, integrasi dengan kebijakan keamanan informasi nasional (BSSN). Audit dan Evaluasi Keamanan Informasi dengan penilaian berkala terhadap sistem pengamanan informasi pemerintah daerah, peningkatan sistem proteksi sesuai hasil audit keamanan. Peningkatan Kapasitas SDM dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis tentang persandian, keamanan siber, dan enkripsi data, sosialisasi pentingnya pengamanan informasi kepada OPD terkait.
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dalam Pencapaian Renstra adalah untuk menjamin keamanan informasi pemerintah dengan program ini menjaga kerahasiaan dan keutuhan data, sehingga mendukung implementasi program/kegiatan Renstra tanpa risiko kebocoran data. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pengamanan informasi menjadi pondasi e-Government yang efektif dan terpercaya. Meningkatkan Kepercayaan Publik dengan perlindungan data publik yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Memastikan Kelancaran Operasional dengan sistem keamanan informasi yang kuat meminimalisir risiko gangguan layanan publik yang berbasis digital.

Dengan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diharapkan terjaminnya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah, tersedianya sistem pengamanan informasi dan persandian yang sesuai standar nasional, meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi dan terpenuhinya indikator kinerja Renstra bidang pengamanan informasi dan persandian.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan ada 14 Jenis kegiatan yang dimiliki Diskominfo Kab. Barito Kuala adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 10. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 11. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 12. Penyelenggaraan Statistik Sektorial diUraian Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, 13. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 14. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja

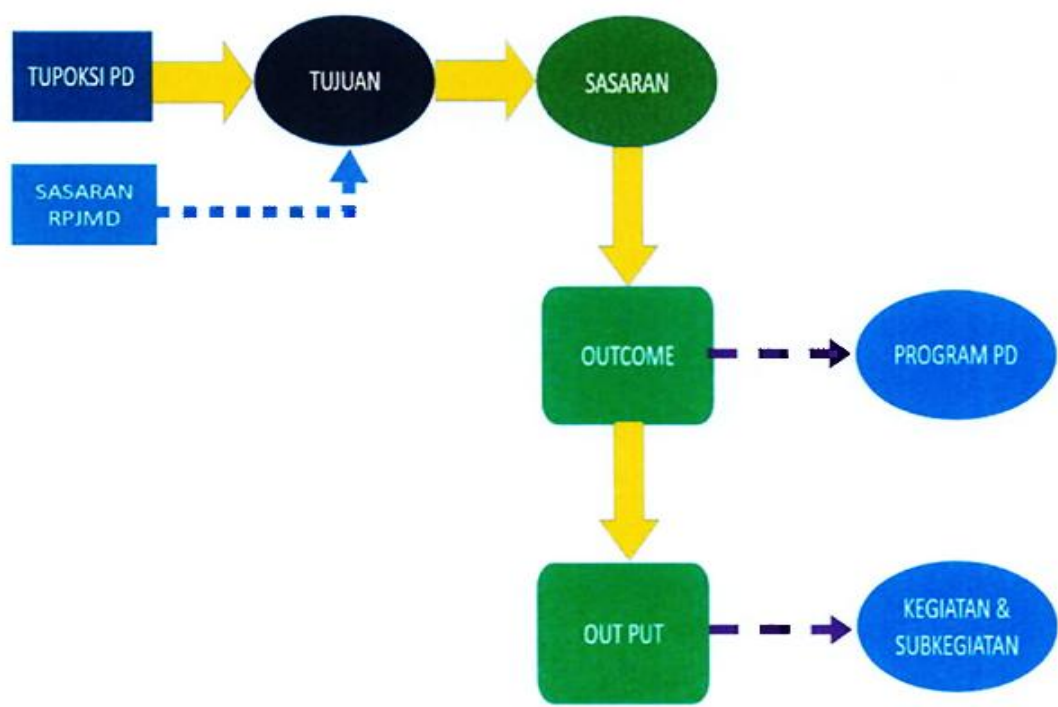
tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.

Untuk kegiatan yang memiliki arahan target keluaran, dan waktu pelaksanaan yang sama maka pelaksanaannya disatukan Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa untuk Perumusan Rencana Program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika seperti kerangka gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Sumber Data : Inmendagri 2 Tahun 2025

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA							
Permen Kominfo No. 8/2019 tentang urusan kunkuren Bidang Kominfo; Perpres No. 95/2018 tentang SPBE; Perpres No.53/2017 tentang BSSN; Peraturan BSSN No. 4/2021 tentang Pedoman Keamanan Siber M3.1.1. Meningkatnya kuatitas insfrastruktur; M4.1.2 Optimalnya tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pelayanan Publik Berbasis Digital dan terintegrasi, Kualitas Layanan Statistik Sektoral, dan Mewujudkan Keamanan Informasi dan Persandian dalam mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indeks SPBE (Indeks)		
					Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)		
					Indeks Keamanan Informasi (Indeks)		
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala			Persentase meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat (%)		
					Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)		
			Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Masyarakat	Jumlah Informasi Publik	Jumlah Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat (Angka)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
				Jumlah Komunikasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			Meningkatnya Aplikasi Yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi		Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Persentase Pengelolaan SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya PD yang menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)		

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)		
					Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Persentase Pengelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah inovasi	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu		2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

S

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang yang Tercatat dan Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

S

Tabel 4.3

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.027.661.245,00		11.866.401.245,00		12.268.701.245,00		11.875.401.245,00		12.278.701.245,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.452.147.271,00		4.452.147.271,00		4.452.147.271,00		4.452.147.271,00		4.452.147.271,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB	BB	3.452.147.271,00	A	4.452.147.271,00	A	4.452.147.271,00	A	4.452.147.271,00	A	4.452.147.271,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
	Jumlah inovasi (Angka)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	5	115.000.000,00	5	115.000.000,00	5	115.000.000,00		115.000.000,00	5	115.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.167.297.271,00		3.167.297.271,00		3.167.297.271,00		3.167.297.271,00		3.167.297.271,00		
Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	2.167.297.271,00	12	3.167.297.271,00	12	3.167.297.271,00	12	3.167.297.271,00	12	3.167.297.271,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336	336		336		336		336		336			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.073.297.271,00		3.073.297.271,00		3.073.297.271,00		3.073.297.271,00		3.073.297.271,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336	336	2.073.297.271,00	336	3.073.297.271,00	336	3.073.297.271,00	336	3.073.297.271,00	336	3.073.297.271,00		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	89.000.000,00	12	89.000.000,00	12	89.000.000,00	12	89.000.000,00	12	89.000.000,00		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5		5	32.000.000,00	5	32.000.000,00	5	32.000.000,00	5	32.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		12		12		12		12					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		5		5		5		5					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		50		50		50		50					

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00		
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	336.000.000,00	4	336.000.000,00	4	336.000.000,00	4	336.000.000,00	4	336.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2					

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2.000	30.000.000,00	2.000	30.000.000,00	2.000	30.000.000,00	2.000	30.000.000,00	2.000	30.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2.000	1.000.000,00	2.000	1.000.000,00	2.000	1.000.000,00	2.000	1.000.000,00	2.000	1.000.000,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	565.000.000,00	1	565.000.000,00	1	565.000.000,00	1	565.000.000,00	1	565.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		30		30		30		30		30			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		15		15		15		15					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1					
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		15	145.000.000,00	15	145.000.000,00	15	145.000.000,00	15	145.000.000,00	15	145.000.000,00		
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.850.000,00		155.850.000,00		155.850.000,00		155.850.000,00		155.850.000,00		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	155.850.000,00	12	155.850.000,00	12	155.850.000,00	12	155.850.000,00	12	155.850.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.050.000,00		129.050.000,00		129.050.000,00		129.050.000,00		129.050.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	129.050.000,00	12	129.050.000,00	12	129.050.000,00	12	129.050.000,00	12	129.050.000,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00	12	13.400.000,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang yang Tercatat dan Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2	66.000.000,00	2	66.000.000,00	2	66.000.000,00	2	66.000.000,00	2	66.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7		7		7		7		7			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		2		2		2		2		2			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00				
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Masyarakat	Jumlah Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat (Angka)	5.746	6.332	4.519.953.974,00	6.648	4.519.953.974,00	6.981	4.519.953.974,00	7.330	4.519.953.974,00	7.697	4.519.953.974,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA			
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00		4.519.953.974,00				
Jumlah Informasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	5	4.246.028.974,00	5	4.246.028.974,00	5	4.246.028.974,00	5	4.246.028.974,00	5	4.246.028.974,00				
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	363	363				363				363			363		
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	240	240				240				240			240		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00				
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	363	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00				
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00				
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	240	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00				

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		3.830.139.750,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	363	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00	363	3.830.139.750,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00		349.589.824,00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	240	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00	240	349.589.824,00		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				66.299.400,00		66.299.400,00		66.299.400,00		66.299.400,00		66.299.400,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	5	66.299.400,00	5	66.299.400,00	5	66.299.400,00	5	66.299.400,00	5	66.299.400,00		
Jumlah Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	60	273.925.000,00	70	273.925.000,00	80	273.925.000,00	90	273.925.000,00	100	273.925.000,00		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	201		201		201		201					
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	80	231		231		231		231					
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	201	60.000.000,00	201	60.000.000,00	201	60.000.000,00	201	60.000.000,00	201	60.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				203.925.000,00		203.925.000,00		203.925.000,00		203.925.000,00		203.925.000,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	80	231	203.925.000,00	231	203.925.000,00	231	203.925.000,00	231	203.925.000,00	231	203.925.000,00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	60	10.000.000,00	70	10.000.000,00	80	10.000.000,00	90	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4.055.560.000,00		2.894.300.000,00		3.296.600.000,00		2.903.300.000,00		3.306.600.000,00		
Meningkatnya Aplikasi Yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	0	85	4.055.560.000,00	87,50	2.894.300.000,00	90	3.296.600.000,00	92,50	2.903.300.000,00	95	3.306.600.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	10,127	20		30		40		50		60			
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	54	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	54	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00	75	115.000.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.940.560.000,00		2.779.300.000,00		3.181.600.000,00		2.788.300.000,00		3.191.600.000,00		
Persentase Pengelolaan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	2	3.940.560.000,00	2	2.779.300.000,00	2	3.181.600.000,00	2	2.788.300.000,00	2	3.191.600.000,00		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	47		47		47		47		47			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1				1				1			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		2				2				2			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	2				2				2			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	6		6		6		6					
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	2		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				66.000.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	6	66.000.000,00	6	66.000.000,00	6	70.000.000,00	6	75.000.000,00	6	80.000.000,00		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				203.300.000,00		0,00		203.300.000,00		0,00		203.300.000,00		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1	203.300.000,00		0,00	1	203.300.000,00		0,00	1	203.300.000,00		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				362.960.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	15	362.960.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				75.000.000,00		0,00		75.000.000,00		0,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	2	75.000.000,00		0,00	2	75.000.000,00		0,00	2	75.000.000,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				750.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	2	750.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				203.300.000,00		203.300.000,00		203.300.000,00		203.300.000,00		203.300.000,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)		1	203.300.000,00	1	203.300.000,00	1	203.300.000,00	1	203.300.000,00	1	203.300.000,00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	47	2.000.000.000,00	47	2.000.000.000,00	47	2.000.000.000,00	47	2.000.000.000,00	47	2.000.000.000,00		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				120.000.000,00		0,00		120.000.000,00		0,00		120.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		2	120.000.000,00		0,00	2	120.000.000,00		0,00	2	120.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				160.041.106,00		340.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		455.000.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				160.041.106,00		340.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		455.000.000,00		
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,31	2,8	160.041.106,00	3,0	340.000.000,00	3,2	385.000.000,00	3,4	420.000.000,00	3,6	455.000.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				160.041.106,00		340.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		455.000.000,00		
Persentase Data Statistik Sektoral yang Layak Publikasi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	10	46,66	160.041.106,00	60,00	340.000.000,00	73,33	385.000.000,00	86,33	420.000.000,00	100	455.000.000,00		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	30	30		33		33		33		33			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	96%	100		100				100		100			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	10	46,66		60,00		73,33		86,33		100			
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2	33,33		50,00		66,66		83,33		100			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				30.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	10	46,66	30.000.000,00	60,00	60.000.000,00	73,33	65.000.000,00	86,33	70.000.000,00	100	75.000.000,00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				30.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	10	46,66	30.000.000,00	60,00	60.000.000,00	73,33	65.000.000,00	86,33	70.000.000,00	100	75.000.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				30.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	96%	100	30.000.000,00	100	60.000.000,00		65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				30.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	30	30	30.000.000,00	33	60.000.000,00	33	65.000.000,00	33	70.000.000,00	33	75.000.000,00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				40.041.106,00		60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2	33,33	40.041.106,00	50,00	60.000.000,00	66,66	75.000.000,00	83,33	80.000.000,00	100	85.000.000,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2	2	0,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				207.961.705,00		450.000.000,00		575.000.000,00		700.000.000,00		825.000.000,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				207.961.705,00		450.000.000,00		575.000.000,00		700.000.000,00		825.000.000,00		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	60,930	65,00	207.961.705,00	70,00	450.000.000,00	75,00	575.000.000,00	80,00	700.000.000,00	85,00	825.000.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				157.961.705,00		325.000.000,00		400.000.000,00		475.000.000,00		550.000.000,00		
Persentase Pengelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	157.961.705,00	1	325.000.000,00	1	400.000.000,00	1	475.000.000,00	1	550.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	47	47				53				53			

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				20.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				97.961.705,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	97.961.705,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				20.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	47	47	20.000.000,00	53	50.000.000,00	53	75.000.000,00	53	100.000.000,00	53	125.000.000,00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				20.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		

S

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00		
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	47	53	50.000.000,00	53	125.000.000,00	53	175.000.000,00	53	225.000.000,00	53	275.000.000,00		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				50.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	47	53	50.000.000,00	53	125.000.000,00	53	175.000.000,00	53	225.000.000,00	53	275.000.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Aplikasi Yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Sesuai Rumusan terhadap Di dalam RPJMD 2025 - 2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Diskominfo berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat yakni Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan sebagai penunjang pada empat misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama Diskominfo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA									
1.	Persentase meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat	Persen	75	78	82	86	91	95	100	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	10,13	18,00	20,00	30	40	50	60	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	51	60	70	73	76	79	82	

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kab. Barito Kuala tahun 2025- 2029 yakni :

Tujuan :

“Meningkatnya kualitas infrastruktur Pelayanan Publik Berbasis Digital dan terintegrasi, Kualitas Layanan Statistik Sektoral, dan Mewujudkan Keamanan Informasi dan Persandian dalam mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Indikator Tujuan :

- 1. Indeks SPBE
- 2. Indeks Pemerintahan Digital
- 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- 4. Indeks Keamanan Informasi

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatnya PD yang menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator Sasaran :

1. Persentase meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang disampaikan kepada masyarakat
 2. Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
 3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
 4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
 5. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang sangat penting dalam sistem manajemen kinerja Diskominfo Kab. Barito Kuala. IKK berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan strategis organisasi secara objektif dan terukur selama lima tahun. Melalui IKK, Diskominfo Kab. Barito Kuala dapat memantau progres kegiatan dan program, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. IKK berperan sebagai kompas yang memberikan arah bagi Diskominfo Kab. Barito Kuala dalam mencapai visi dan misi. Dengan menetapkan indikator-indikator yang relevan dan spesifik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan terfokus pada hasil yang bernilai dan berdampak nyata. Hal ini membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya dan memaksimalkan efisiensi kerja. Selain sebagai alat evaluasi, IKK juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja. Capaian IKK menjadi bukti nyata atas kinerja Diskominfo Kab. Barito Kuala secara keseluruhan. Dalam konteks sektor publik, IKK menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rencana Strategis Diskominfo IKK juga mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented culture). Dengan adanya target kinerja yang jelas, setiap pegawai atau tim terdorong untuk bekerja lebih produktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemantauan terhadap IKK secara berkala memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan

berkelanjutan (continuous improvement) berdasarkan data dan fakta. Indikator Kinerja Kunci Diskominfo Kab. Barito Kuala dalam periode Renstra 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Renstra Kabupaten Barito Kuala

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	10,13	18,00	20,00	30	40	50	60	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	51	60	70	73	76	79	82	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala

Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Marabahan, 18 September 2025

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ARIS SAPUTERA, S.STP., M.Si

NIP. 19860405 200412 1 001



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /KUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
TAHUN 2025-2029**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD serta Pasal 108 huruf a menyebutkan bahwa Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus akan menjadi Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Tahun 2025 - 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA



DINANSYAH

Lampiran XV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 54 /KUM/2025
Tanggal 4 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua Tim	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Layanan E-Government 3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH